

INDONESIA - UNDANGAN PENGAJUAN PROPOSAL

Batas waktu: 12 Agustus, 2015

Indikasi Pendanaan:

US\$400,000 - US\$800,000. Permintaan di bawah jumlah tersebut akan tetap dipertimbangkan.

The Global Partnership for Social Accountability (GPSA) mendukung masyarakat sipil dan pemerintah untuk bekerja bersama menyelesaikan tantangan-tantangan kritis terkait pembangunan di negara berkembang. Untuk meraih tujuan ini, GPSA menyediakan dukungan strategis dan berkelanjutan guna membantu organisasi masyarakat sipil yang menawarkan inisiatif akuntabilitas sosial demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dukungan ini bertumpu pada kerjasama erat Bank Dunia dengan para penggiat sektor publik, dan juga mitra pembangunan (*developing partners*) Bank Dunia, guna menciptakan lingkungan dimana *masukan warga digunakan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar pelayanan publik dan memperkuat performa lembaga pemerintahan*. Melalui pendekatan yang disesuaikan di masing-masing negara, kegiatan yang didanai GPSA diimplementasikan di sektor-sektor tertentu dimana Bank Dunia punya keterkaitan yang erat dan bisa membantu pemerintah merespon masukan dari warganya.

GPSA bekerja untuk “menutup celah” dengan mendukung warga bersuara, membantu pemerintah menyimak dan membantu institusi-institusi pemerintah bertindak sesuai dengan masukan yang mereka peroleh.

GPSA dengan bangga mengumumkan Panggilan Proposal Global ke-3. GPSA akan mendukung proposal dari organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mengukuhkan transparansi, inovasi dan partisipasi di ruang-ruang publik, dengan elemen akuntabilitas yang kuat. Dari Indonesia, GPSA mencari proposal tentang akuntabilitas sosial untuk mengawasi pelaksanaan program-program pelayanan yang didanai pemerintah pusat, yang berhubungan dengan **pendidikan, kesehatan, investasi infrastruktur, sumber daya alam dan pertambangan serta pembelanjaan anggaran**, seperti yang dilakukan oleh berbagai unit pemerintah daerah yang inovatif (propinsi, kabupaten, kota). Proposal yang diajukan hendaknya menitikberatkan:

- ⇒ *Transparansi –berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lain, untuk menjadikan data anggaran belanja daerah transparan untuk warga di tingkat lokal (transparansi fiskal).*
- ⇒ *Inovasi – berkolaborasi dengan mitra di dunia teknologi atau media massa, untuk memantau dan menampilkan informasi mengenai belanja dan pengadaan anggaran pemerintah yang bersifat kompleks, menjadi mudah dicerna dan diakses oleh masyarakat.*
- ⇒ *Partisipasi – berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah yang inovatif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemberian layanan, dalam hubungannya dengan belanja anggaran pemerintah di tingkat daerah, dan untuk mengumpulkan serta menganalisa data dari hasil-hasil implementasi program pemerintah.*

Seperti pendekatan GPSA sebelumnya, informasi yang dihasilkan dari proyek yang didanai GPSA ini akan dibagi dan digunakan oleh lembaga publik di luar lembaga legislasi dan lembaga pengawas lainnya.

Proposal yang akan dipertimbangkan sebaiknya mencakup beberapa hal dibawah ini:

1. Proyek dapat dikembangkan dari skala percobaan ke skala yang lebih besar dan dapat direplikasi secara nasional;
2. Inisiatif yang diajukan terkait dengan inisiatif yang telah ada, yang berfokus pada tujuan serupa. Harus memperlihatkan nilai tambah dari dukungan GPSA;
3. Dapat mengajukan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil lain yang akan meluaskan skala proposal yang diajukan; dan
4. Proyek yang diajukan akan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendampingi proses yang sudah ada dan didukung oleh lembaga publik yang relevan.

GPSA akan mendukung proposal yang:

- Menunjukkan pengalaman yang telah terbukti: berpengalaman setidaknya 3-5 tahun, sehingga dapat mengimplementasikan pendanaan yang berkelanjutan;
- Diajukan oleh organisasi masyarakat sipil yang berbentuk badan hukum di Indonesia seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi media non-profit, organisasi amal, organisasi berbasis agama, organisasi berbasis profesi, serikat buruh, organisasi karyawan, asosiasi anggota dewan perwakilan, yayasan, lembaga riset dan pengembangan kebijakan.
- Organisasi yang mengajukan proposal harus menunjukkan bukti status hukum di salah satu negara yang berada dalam daftar GPSA (“opted-in”) ini.

Jika Anda tertarik untuk mengajukan proposal, silahkan kunjungi:

<http://www.thegpsa.org/sa/funding/3rd-call-proposals>

untuk membaca Petunjuk Aplikasi GPSA (GPSA Application Guidelines) dan mengakses aplikasi elektronik.

Untuk informasi mengenai sesi orientasi yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, silahkan hubungi:

Dini Sari Djalal

ddjalal@worldbank.org

Kurie Suditomo

ksuditomo@worldbank.org

Sesi Orientasi:

Akan menyusul pada awal bulan Juli dan awal bulan Agustus